

## **ANALISIS TIPOLOGI PERENCANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN SIDOGIRI PASURUAN, SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO, DAN AL-AMIEN PRENDUAN**

### **TYOLOGICAL ANALYSIS OF EDUCATIONAL CURRICULUM PLANNING IN THREE ISLAMIC BOARDING SCHOOLS: SIDOGIRI PASURUAN, SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO, AND AL-AMIEN PRENDUAN**

**Ahmad Hosaini**

Universitas Wisnuwardhana Malang  
hosainiahmad@gmail.com

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tipologi perencanaan kurikulum pendidikan pondok pesantren di tiga pesantren, yaitu pesantren Sidogiri Pasuruan, pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, dan pesantren Al-Amin Prenduan Sumenep. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis karakteristik perencanaan kurikulum pendidikan di tiga pesantren yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan studi kasus pada tiga pesantren, yang dilakukan dalam rentang waktu bulan April-Mei 2015, untuk menemukan karakteristik dalam konteks perencanaan kurikulum pendidikannya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sementara itu, analisis data yang digunakan adalah dengan analisis data lintas kasus (cross case analyses) pada tiga pesantren tersebut.

**Kata kunci:** perencanaan kurikulum, pondok pesantren, sidogiri, al-amien, salafiyah syafi'iyah.

---

**Abstract:** The research analyzes the typology of the planning of the educational curriculum in three Islamic boarding schools, namely Sidogiri Pasuruan, Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, and Al-Amin Prenduan Sumenep. This field research used a qualitative method and a case study to analyze the characteristics of the planning

of the educational curriculum in three Islamic boarding schools mentioned, which were the objects of investigation. This research was conducted between April 2015 and May 2015. The collection data methods were interviews, observations, and documentation study, while the data analysis used was a cross-case analysis of three Islamic boarding schools mentioned.

**Keywords:** curriculum planning, Islamic boarding school, sidogiri, al-amien, salafiyah syafi'iyah.

## **Pendahuluan**

Kurikulum dapat dikatakan sebagai roh bagi penyelenggaraan pendidikan baik formal, informal maupun nonformal. Kurikulum juga sebagai barometer keberhasilan pendidikan. Pendidikan yang baik tergantung dari desain kurikulum di dalamnya. Menurut Sukmadinata kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan.<sup>1</sup> Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri.

Di Indonesia, kurikulum sering mengalami perubahan-perubahan. Hampir perubahan tersebut menjadi komoditas politik karena dalam setiap periode kepemimpinan bangsa Indonesia bisa dipastikan mengalami perubahan kurikulum. Hal ini menjadikan lembaga pendidikan sebagai pelaksana kurikulum, kelimpungan dalam mengimplementasikan kurikulum. Bahkan, tak jarang kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, tak mampu dijangkau oleh lembaga pendidikan karena terlalu ideal, sehingga pelaksanaannya cenderung dipaksakan. Sarana, Sumber Daya Manusia, dan pendanaan tidak memadai.

Sebagai gambaran atas persoalan ini, yaitu Kurikulum 2013. Perubahan kurikulum dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 ke Kurikul 2013 karena KTSP

---

<sup>1</sup> Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), 4.

dianggap tidak lagi relevan.<sup>2</sup> Kurikulum 2013 diterapkan di 6.221 sekolah sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 dan di semua sekolah pada Tahun Pelajaran 2014/2015. Sementara keputusan menteri tersebut menyangkut penghentian pelaksanaan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang baru menerapkan K-13 satu semester, yaitu pada Tahun Pelajaran 2014/2015. Sekolah-sekolah tersebut dikembalikan menggunakan Kurikulum 2006.

Kesemrautan kurikulum di Indonesia tersebut, salah satunya karena kegagalan dalam aspek perencanaan, sehingga perubahan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah seringkali tidak tepat sasaran dan cenderung dipaksakan untuk diimplementasikan oleh lembaga pendidikan. Padahal setiap lembaga pendidikan memiliki tuntutan, kondisi, dan kemampuan yang berbeda-beda. Contoh sederhana, yaitu pada komponen evaluasi di kurikulum 2013 dengan sistem komputer, tidak semua lembaga pendidika mampu melaksanakan katerna keterbatasan komputer dan jaringan. Akibatnya, kurikulum tidak terlaksana dengan baik dalam memajukan pendidikan di Indonesia.

Perencanaan (planning) dalam pandangan Solihin pada dasarnya merupakan suatu proses untuk menetapkan di awal berbagai hasil akhir (end results) yang ingin dicapai di masa mendatang.<sup>3</sup> Begitu juga dengan perencanaan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga pendidikan, termasuk oleh pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam terbesar di Indonesia. Untuk menetapkan berbagai program pendidikan di pesantren, pondok pesantren mesti

---

<sup>2</sup> Andar Suhanda, *Perencanaan Kurikulum Di Smp Negeri 3 Singkawang, Akutabilitas Manajemen Pendidikan 1*, Nomor 2, (Juni 2013), 176.

<sup>3</sup> Mahfud Sholihin, *Total Quality Management, Balanced Scorecard And Performance, JAAI 13 NO. 1, (JUNI 2009): 64.*

menyusun perencanaan kurikulum untuk satu tahun pelajaran selanjutnya.

Pesantren memiliki karakter asli (indogeneous) Indonesia dan peranannya bagi perkembangan Islam di Nusantara tak diragukan lagi.<sup>4</sup> Sebagai lembaga pendidikan, pesantren menjadi bagian dari pendidikan nasional. Bahkan Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam terbesar di Indonesia yang memiliki karakter dan ciri khas berbeda dengan lembaga pendidikan non pesantren. Terdapat 5 syarat minimal agar lembaga pendidikan masuk kategori sebagai pesantren: kiai, kitab kuning, musala, santri, dan asrama. Pesantren berasal dari kata "Santri", dengan awalan "pe" dan akhiran "an" yang berarti tempat tinggal para santri.<sup>5</sup>

Sistem pendidikan pesantren adakalanya fokus pada penguatan dan penguasaan ilmu agama dengan tidak menyelenggarakan pendidikan umum. Pesantren ini disebut dengan pesantren salaf. Ada juga pendidikan pesantren mengintegrasikan pendidikan agama dan umum. Pesantren yang dalam mengintegrasikan pendidikan agama dan umum dengan lebih fokus pada pendidikan agama, masuk pada kategori pesantren semi modern dengan sistem pengelolaan tradisonal dan modern. Sedangkan pesantren yang lebih fokus pada pendidikan agama dan umum dengan sistem manajemen modern, dapat disebut pesantren modern.

Pesantren yang berusaha untuk mensinergikan antara pengetahuan umum dengan pengetahuan agama biasanya pesantren tersebut lebih terbuka terhadap pertumbuhan dan perkembangan zaman. Sementara pesantren yang

---

<sup>4</sup> Thoha Habil, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm., 41.

<sup>5</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3IS, 1994), 18.

mendikotomi pendidikan menjadi dua antara agama dan umum biasanya pesantren tersebut lebih hati-hati atau mereka lebih selektif di dalam menyikapi pertumbuhan dan perubahan zaman dan atau mereka belum dapat mendesain kurikulum pendidikan pesantren dengan baik sesuai dengan tuntutan zaman.

Perbedaan sistem pendidikan tersebut (pesantren salaf, semi modern, dan modern) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh perencanaan yang berbeda sehingga menghasilkan tujuan, isi, proses, dan evaluasi yang juga berbeda. Namun perbedaan ini tidak menjadikan jati diri pesantren luntur, akan tetapi justru saling melengkapi sehingga lulusan pesantren tidak hanya menguasai ilmu agama tetapi juga ilmu umum. Keduanya memang tak dapat dipisahkan dan saling membutuhkan dalam membangun kemajuan.

Dalam hal ini, penulis akan membidik tidak pondok pesantren. Pertama, Pondok Pesantren Sidogiri. Pesantren tersebut bertipologi salaf dan pengelolaan kurikulumnya mandiri serta tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Kedua, Pondok Pesantren Sukorejo. Demikian merupakan pesantren yang kurikulumnya memadukan antara kurikulum pemerintah dan kurikulum pesantren. Akan tetapi, kurikulum pesantren merupakan kurikulum pokok dan inti di lembaga pendidikan Pondok Pesantren Sukorejo. Ketiga, Pesantren Al-Amien Pragaan Sumenep. Demikian pondok pesantren yang lebih menonjol karakter moderennya, mulai dari kurikulumnya hingga sistem pengelolaannya.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi multi kasus untuk memungkinkan peneliti menemukan persamaan dan perbedaan mengenai perencanaan kurikulum dari ketiga pesantren tersebut.. Peneliti sebagai instrument kunci (key instrument) di lapangan, hadir langsung ke lapangan.

Pesantren Sidogiri dari tanggal 11 sampai 18 April 2015, di Pesantren Sukorejo sejak tanggal 24 April sampai 04 Mei 2015. Sementara di Pesantren Al-Amien mulai tanggal 14 sampai 20 Mei 2015.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada informan yang bersentuhan langsung dengan fokus penelitian, observasi, dan studi dokumentasi. Mengingat penelitian ini menggunakan rancangan studi multi kasus, maka alisis data dilakukan dengan dua tahap, yaitu analisis data kasus individu (*individual case*) dan analisis data lintas kasus (*cross case analysis*).

### **Perencanaan Kurikulum Pendidikan Pondok Pesantren Sidogiri**

Perencanaan kurikulum secara umum yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Sidogiri bersamaan dengan evaluasi dalam setiap akhir tahun. Dalam rapat akhir tahun tersebut dibicarakan terkait dengan kebutuhan anggaran untuk tahun berikutnya, ruang kelas, tenaga yang dibutuhkan, sistem belajar mengajar, dan usulan program yang akan disempurnakan. Anggaran belanja tersebut dibahas secara tuntas, sehingga kepala lembaga tinggal menjalankan program tanpa direpotkan lagi dengan persoalan anggaran.

Pesantren Sidogiri termasuk pesantren yang benar-benar mandiri dan teguh dengan pendirian. Sidogiri tidak pernah menerima bantuan apa pun dari pemerintah karena Sidogiri hanya ingin mengabdikan dan berbakti pada pemerintah dan tidak ingin merepotkan pemerintah. Sidogiri hanya ingin menjadi anak baik dan dewasa dalam pemerintah agar menjadi kuat dan tidak ada keinginan untuk menjadi anak durhaka. Jika ada bantuan menurutnya silahkan diberikan pada lembaga yang

membutuhkan. Walaupun demikian, hubungan pesantren dengan pemerintah tetap berjalan dengan baik.

Mekanisme penerimaan dan penggunaan anggaran dalam setiap tahun sudah ada pedoman untuk semua instansi dengan terlebih dahulu mengajukan Nota Permohonan Uang (NPU) kepada bendahara pesantren dan setiap selesai kegiatan harus dipertanggungjawabkan melalui bentuk LPJ. Sementara Anggaran Pesantren Sidogiri bersumber dari koperasi pesantren dan tanah yang dikelola oleh pesantren.

Perencanaan dalam konteks belajar mengajar dan penetapan mata pelajaran yang ada tetap mandiri tidak mengikuti sistem kurikulum nasional dan tidak mengalami perubahan hanya menyesuaikan sedikit dengan perkembangan jaman. Titik tekannya ada pada guru bagaimana mampu memahami dan menyampaikan materi yang akan diajarkan dengan memberikan contoh-contoh yang ada dalam kitab lain.

Mekanisme dalam perencanaan kurikulum adalah melalui rapat internal yang disampaikan pada rapat komisi, tetapi keputusan final dan mutlak ada di tangan pengasuh dalam setiap tahun. Sidogiri menggunakan kurikulum sendiri dan untuk kalangan sendiri serta tidak berkiblat pada pemerintah. Kepala sekolah tidak merencanakan kurikulum karena kurikulum sudah diberikan tinggal menjalankan sesuai dengan target Kepala sekolah dalam lembaga pendidikan tinggal melaksanakan program kegiatan dalam lembaga dan tidak perlu merancang kegiatan karena yang merancang dan mengevaluasi adalah Batartama (Badan Tarbiyah Wat Taklim al-Madrasy) sebagai staff atau kepanjangan dari ketua I. Di mana BATARTAMA merupakan lembaga yang didirikan untuk membantu program madrasah, seperti pengembangan kurikulum, kualitas guru, kompetensi murid dan semua hal

yang berhubungan dengan peningkatan kualitas KBM di madrasah.

### **Perencanaan Kurikulum Pendidikan Pondok Pesantren Sukorejo**

Ada dua bentuk dan model pendidikan yang ada di Pesantren Sukorejo: pendidikan Diniyah dan pendidikan sekolah formal. Sekolah formal di pesantren tersebut berafiliasi dengan kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Melihat dua model pendidikan tersebut tentunya perencanaan kurikulumnya berbeda dengan madrasah diniyah. Dalam hal perencanaan pembelajaran, sekolah formal mengacu pada RPP, Silabus, Promis dan Prota.

Sementara kurikulum diniyah, mengacu pada ketetapan yang berlaku di pesantren dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Perencanaannya pun bersifat kondisional dan bahkan dalam pengakuan wakil pengasuh tidak pernah merancang dan merencanakan kurikulum hanya mengevaluasi apa yang ada disesuaikan dengan kondisi siswa dan keadaan zaman. Kurikulum Pesantren Sukorejo hampir tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun hanya menyesuaikan sedikit dengan perkembangan zaman. Itu pun dilakukan berdasarkan dengan evaluasi yang dilakukan.

Perencanaan dalam pengembangan profesi guru dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan seperti workshop, seminar dan kegiatan lain baik yang dilakukan oleh lembaga, pesantren maupun oleh pemerintah.

Sama halnya dengan Perguruan Tinggi yang ada di pesantren, ada yang mengikuti kurikulum Kementerian Agama dan ada yang mengikuti Kementerian RISTEKDIKTI. Dengan demikian, maka perencanaan kurikulumnya juga

menyesuaikan dengan apa yang berlaku dalam kedua kementerian tersebut.

Dalam hal anggaran, Pesantren Sukorejo mengenal istilah sentralisasi keuangan. Artinya, semua yang mengelola keuangan yang ada lembaga adalah terpusat di pesantren. Pesantren juga mengenal istilah budget dan nonbudget. Budget berasal dari anggaran yang di dapat secara reguler yang bersumber dari Uang Tahunan Pesantren (UTAP) dan usaha-usaha pesantren. Sementara yang nonbudget berasal dari bantuan pemerintah baik dari BOS, BSM, BKSM dan bantuan-bantuan yang lain karena bantuan apa pun dari pemerintah untuk lembaga semuanya dititipkan ke bendahara pesantren. Kalau nanti dibutuhkan lembaga tinggal mengajukan anggaran berapa bantuan yang masuk ke pesantren.

Dengan sistem sentralisasi keuangan yang ada di Pesantren Sukorejo, maka sangat membantu terhadap perjalanan lembaga. Tidak ada lembaga yang mengalami kolaps walaupun dengan kondisi dan siswa atau mahasiswa yang sedikit karena pesantren mengenal istilah subsidi silang. Sementara penganggaran pendidikan di pesantren dilakukan dan ditentukan dalam setiap tahun, sehingga lembaga tidak disibukkan dengan urusan keuangan, nanti lembaga tinggal mengajukan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh pesantren.

## **Perencanaan Kurikulum Pendidikan Pondok Pesantren Al-Amien Sumenep**

Secara umum perencanaan kurikulum di Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (TMI) tidak pernah berubah sejak pengasuh Kiai Idris Jauhari. Artinya kurikulum sudah dipatenkan hanya melakukan sedikit revisi disesuaikan

dengan kebutuhan. Perencanaannya sama dengan sekolah di luar, ada Silabus, RPP, Promis dan Prota. Bahkan penggunaan RPP lebih dulu dilakukan sebelum pemerintah mewajibkan. Perencanaan kurikulum dalam setiap tahun bersamaan dengan evaluasi. Termasuk yang direncanakan dalam setiap tahun adalah sarana dan prasarana seperti kursi, meja, papan tulis dan kebutuhan ruang kelas.

Kebijakan kurikulum ma'hadiyah tidak berubah dari tahun ketahun. Akan tetapi kurikulum pemerintah menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Kalau kurikulum di IDIA sudah lama tidak mengalami perubahan dan menggunakan kurikulum yang sudah ada.

Penganggaran yang ada di Al-Amien dikelola oleh masing-masing lembaga tidak terpusat di pesantren. Anggaran sekolah formal dapat bantuan dari pemerintah, tapi untuk ma'hadiyah bisa dengan iuran perbulan seperti di Pondok Tegal atau berasal dari bantuan lain yang halal. Bantuan dari pemerintah seperti BOS langsung ke lembaga atas sepengetahuan yayasan. Setiap lembaga mempunyai lembaga keuangan atau badan usaha sendiri. Walaupun ada kewajiban lapor setiap bulan ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Kesejahteraan (BPKK) dan Majelis Kiai sekaligus sebagai auditornya.

Di Al-Amien terdapat monopoli pasar. Di mana santri diwajibkan untuk berbelanja di dalam pesantren dan tidak boleh belanja di luar pesantren. Kebutuhan pesantren dikontrol dengan baik seperti tidak boleh menjual mie instan dan tidak boleh menjual makanan dengan harga lebih dari 3.000. Ada istilah juga bahwa guru tidak dibayar santri karena secara matematis uang bulanan santri tidak cukup untuk kebutuhan belanja pesantren dalam satu bulan. Maka dari itu, Al-Amien

mempunyai prinsip dari santri, oleh santri dan kembali pada santri.

Berdasarkan temuan penelitian yang dipaparkan di atas, peneliti menemukan perbedaan dalam perencanaan kurikulum di ketiga pondok pesantren tersebut. Perencanaan kurikulum secara umum di pesantren dilakukan dalam setiap tahun bersamaan dengan evaluasi. Kalau dalam Pesantren Sidogiri mekanisme menuju rapat tersebut adalah dengan rapat prakomisi, rapat komisi, rapat pendidikan (pleno), rapat tim perumus, dari tim perumus langsung ke Majelis Keluarga sebagai penentu yang bersifat final dan mutlak.

Sementara di Al-Amien dan Sukorejo, rapat langsung secara menyeluruh dalam setiap tahun. Rapat dalam setiap tahun tersebut dibicarakan semua hal seperti kebutuhan anggaran untuk tahun berikutnya, sarana dan prasarana, tenaga yang dibutuhkan, sistem belajar mengajar, dan usulan program yang akan disempurnakan. Penganggaran untuk semua lembaga dibicarakan secara tuntas dan menyeluruh, sehingga untuk tahun berikutnya lembaga pendidikan tidak direpotkan lagi dengan urusan keuangan bahkan bisa terjadi subsidi silang. Akan tetapi, kalau di Al-Amien penganggarannya dilakukan di setiap lembaga masing-masing.

Perencanaan kurikulum madrasah atau pendidikan formal madrasah diniyah menggunakan kurikulum murni pesantren dan yang berafiliasi dengan pemerintah mengikuti aturan dalam Kementerian Agama. Kementerian Agama menggunakan Kurikulum 2013, maka perencanaan kurikulum madrasah juga menggunakan Silabus dan RPP.

Sementara perencanaan kurikulum pendidikan formal umum mengikuti aturan pemerintah dengan menggunakan RPP, Silabus, Promis dan Prota, kecuali di Sidogiri dan TMI di Al-Amien yang menggunakan kurikulum sendiri tidak ada

sangkut pautnya dengan pemerintah. Akan tetapi, walaupun di TMI Al-Amien tidak ikut aturan pemerintah, TMI sudah menggunakan semacam RPP jauh sebelum pemerintah mewajibkan penggunaannya.

Perencanaan kurikulum Perguruan Tinggi dalam pesantren mengikuti aturan yang berlaku di Kemenag untuk IAIN Sukorejo dan IDIA Al-Amien. Sementara untuk Akademi-Akademi di Sukorejo mengikuti aturan yang berlaku di Kemenristekdikti. Di mana kalau perencanaan pembelajaran di perguruan tinggi menggunakan istilah RPS.

**Tabel 1.1** Perbedaan Perencanaan Kurikulum Pondok Pesantren Sidogiri, Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, dan Al-Amien Prenduan Sumenep

PERENCANAAN	ATURAN	PESANTREN
Pendidikan Diniyah Kemenag	Mengikuti apa yang berlaku di Kemenag	Sukorejo dan Al- Amien kecuali TMI Al-Amien yang menggunakan kurikulum sendiri
Pendidikan Diniyah Pesantren	Kurikulum sendiri	Sidogiri, Sukorejo, dan Al- Amien
Pendidikan umum Kemendikbud	Mengikuti apa yang berlaku di Kemendikbud	Sukorejo dan Al- Amien
Perguruan Tinggi Kemenag	Mengikuti apa yang berlaku di Kemenag	Sukorejo dan Al- Amien

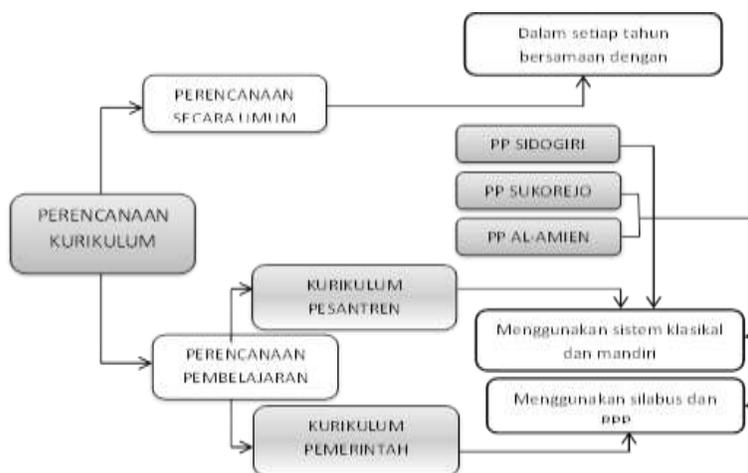
---

Perguruan Tinggi Kemenristekdikti	Mengikuti apa yang berlaku di Kemenristekdikti	Sukorejo
--------------------------------------	---	----------

---

Berdasarkan temuan data dan analisis lintas kasus tentang perencanaan kurikulum pondok pesantren, dapat dipahami bahwa Perencanaan Kurikulum secara umum di pesantren dilakukan dalam setiap tahun yang bersamaan dengan evaluasi. Perencanaan pembelajaran menggunakan aturan pemerintah untuk yang berafiliasi pada Kemendikbud dan Kemenag (Pesantren Sukorejo dan Al-Amien) dengan menggunakan Silabus dan RPP. Perencanaan pembelajaran Pondok Pesantren Sidogiri menggunakan sistem klasik dengan kurikulum sendiri yang tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Begitu juga dengan diniyah takmiliyah Sukorejo dan TIBDA Pondok Putri Al-Amien.

Temuan lintas kasus tentang perencanaan kurikulum pendidikan pondok pesantren dapat dilihat pada gambar 1. 1 mengenai diagram yang menunjukkan perencanaan kurikulum pendidikan pondok pesantren.



Gambar 1.1 Perencanaan Kurikulum Pendidikan Pondok Pesantren

## **Perencanaan Kurikulum Pesantren Berdasarkan Tipologinya**

Berdasarkan teori *market teori* yang di kemukakan oleh Chamberlain dalam Solihin bahwa setiap keputusan yang diambil oleh manajer pada dasarnya merupakan keputusan reaktif (*reaktif decision*) terhadap berbagai perkembangan yang terjadi di lingkungan perusahaan.<sup>6</sup> Dengan ini, perencanaan kurikulum pendidikan yang dilakukan oleh tiga pondok pesantren tersebut dengan menjadikan Kiai atau pengasuh sebagai aktor utama atau manajer yang bertindak sebagai pengambil keputusan dengan mempertimbangkan perkembangan dan tuntutan keadaan, sangatlah tepat untuk kemajuan pendidikan pesantren.

Kalau melihat mekanisme dalam perencanaan kurikulum pesantren, maka masuk pada perspektif perencanaan yang dinamakan *planning mode*. Di mana menurut Robbins, dalam pandangan ini manajer dianggap sebagai seorang pemikir reflektif (*reflektive thinking*) yang akan menetapkan rencana terlebih dahulu untuk kemudian diterapkan dalam kegiatan organisasi perusahaan. *Planning mode* mengasumsikan adanya jeda waktu antar rencana yang dibuat dengan pelaksanaan (implementasi) rencana tersebut. Perencanaan dalam kurikulum pesantren dilakukan setelah evaluasi kurikulum secara menyeluruh dilakukan.<sup>7</sup>

Perencanaan dalam kurikulum pesantren dilakukan dengan rapat untuk mendapatkan laporan secara valid tentang program kurikulum yang telah dilaksanakan selama satu

---

<sup>6</sup> Mahfud Sholihin, Total Quality Management, Balanced Scorecard And Performance, *JAAI* 13 NO. 1, (JUNI 2009): 64

<sup>7</sup> Mahfud Sholihin, Total Quality Management, Balanced Scorecard And Performance, *JAAI* 13 NO. 1, (JUNI 2009): 72.

tahun. Perencanaan membutuhkan data dan informasi agar keputusan yang diambil tidak lepas kaitannya dengan masalah yang dihadapi pada masa yang akan datang. Perencanaan kurikulum meliputi tiga kegiatan, yaitu: perencanaan strategis (*strategic planning*), perencanaan program (*program planning*) dan perencanaan kegiatan pembelajaran (*program delivery plans*)<sup>8</sup>

Berdasarkan macam atau bentuk perencanaan yang dilakukan di tiga pondok pesantren, masuk pada kategori perencanaan operasional bukan perencanaan strategik. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Cunningham dalam Sonhadji bahwa perencanaan operasional atau perencanaan jangka pendek diartikan sebagai proses penentuan tujuan jangka pendek (khusus), penentuan standar kinerja dan pendiskripsian rencana kegiatan. Biasanya perencanaan operasional mencakup waktu beberapa bulan sampai 1 tahun.<sup>9</sup>

Melihat anggaran di pesantren yang diteliti, terutama Pesantren Sidogiri dan Sukorejo yang berjangka pendek selama periode satu tahun dan terpusat di pesantren, sedangkan Al-Amien anggarannya di masing-masing lembaga, maka anggaran tersebut masuk pada kategori *master budget*. *Master budget* menunjukkan keseluruhan perencanaan perusahaan dalam satuan numerik untuk satu periode tertentu dan biasanya bersifat jangka pendek.

Anggaran dalam pesantren dimaksudkan untuk membiayai kegiatan operasi masing-masing lembaga pendidikan agar kegiatan pendidikan berjalan berkelanjutan. Dalam Mulyasa standar pembiayaan adalah standar yang

---

<sup>8</sup> Abdullah Aly, *Pendidikan islam multikultural di pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 65.

<sup>9</sup> Sonhadji, A, *Manusia, Teknologi, dan Pendidikan Menuju Peradaban Baru*. (Malang: UM Press, 2012), 109.

mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.<sup>10</sup>

Sumber dana pendidikan di dalam pesantren ada yang bersumber dari dana pemerintah kecuali Sidogiri yang menolak sumbangan apa pun dari pemerintah. Dana yang diberikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Sebagaimana yang disebutkan dalam UU RI No.20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS pasal 47 ayat (1) sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

Dana pendidikan pesantren tidak hanya bersumber dari pemerintah, tapi juga bersumber dari usaha-usaha pesantren dan sumber lain yang halal dan mengikat karena dana pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Sumber anggaran atau dana dalam pesantren ada yang benar-benar mandiri dengan tidak menerima bantuan apa pun dari pemerintah dan ada juga yang menerima anggaran dari pemerintah tapi dengan seleksi yang ketat. Dalam rangka menjaga kemandirian ekonomi pesantren, maka kedepan pesantren diharapkan dapat benar-benar menjadi lembaga mandiri dengan tidak selalu berpangku tangan pada pemerintah.

Di samping itu, pesantren diharapkan dapat secara jernih melihat peluang dan pangsa pasar dalam mengembangkan usaha-usaha yang dimiliki oleh pesantren. Di mana kecenderungan umat saat ini lebih percaya pada produk atau usaha milik pesantren daripada milik bukan pesantren. Ketika pesantren dapat merangkul semua kekuatan dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan yang ada,

---

<sup>10</sup> E. Mulyasa, *Praktik Penelitian Tindakan Kelas*, (Bandung: Rosdakarya, 2009), 48.

maka pesantren dapat menjadi lembaga yang tidak hanya berkutat pada pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis tapi juga pesantren dapat menjadi penguasa pasar di negeri tercinta ini.

Perencanaan kurikulum pendidikan pondok pesantren landasan teori yang digunakan adalah *market teori* yang di mana setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan reaktif (*reactive decision*) terhadap berbagai perkembangan yang terjadi di dalam pendidikan pesantren. Tujuannya, mencetak santri yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, mandiri, lulusan yang berpendidikan, dan memiliki akhlak atau karakter yang baik serta mandiri.<sup>11</sup>

Mekanisme dalam perencanaan kurikulum dalam pesantren masuk pada perspektif dalam memandang perencanaan yang dinamakan *planning mode*. Di mana pengurus atau pengasuh pesantren dianggap sebagai seorang pemikir reflektif (*reflective thinking*) yang akan menetapkan rencana terlebih dahulu untuk kemudian diterapkan dalam kurikulum pendidikan pesantren.

Berdasarkan macam atau bentuk perencanaan yang dilakukan di tiga pondok pesantren, masuk pada kategori perencanaan operasional atau perencanaan jangka pendek yang hanya berdurasi 1 tahun bukan perencanaan strategik. Perencanaan kurikulum pendidikan formal umum dalam perencanaan pembelajaran mengikuti aturan pemerintah dengan menggunakan RPP, Silabus, Promis dan Prota, kecuali di Sidogiri dan TMI di Al-Amien yang menggunakan kurikulum sendiri tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah. Akan tetapi, walaupun di TMI Al-Amien tidak

---

<sup>11</sup> Nur Widia Wardani, Perencanaan Pengembangan Kurikulum Pada Kulliyatul Mu'allimien Al-Islamiah, *Pendidikan*, Vol.1, No. 5, (Mei 2016): 913.

ikut aturan pemerintah, TMI sudah menggunakan semacam RPP sebelum pemerintah mewajibkan penggunaannya.

Penganggaran di Pesantren Sidogiri dan Sukorejo yang berjangka pendek selama periode satu tahun terpusat di pesantren, sedangkan Al-Amien anggarannya di masing-masing lembaga, maka anggaran tersebut masuk pada kategori *master budget*. Dana pendidikan pesantren kecuali Sidogiri tidak hanya bersumber dari pemerintah tapi juga bersumber dari usaha-usaha pesantren dan sumber lain yang halal dan mengikat karena dana pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Pondok Pesantren Sidogiri dana pendidikannya tidak bersumber dari pemerintah karena Sidogiri ingin menjadi anak yang dewasa dalam pemerintahan. Dana bantuan dari pemerintah dipersilahkan diberikan pada lembaga lain yang membutuhkan.

Perencanaan kurikulum pendidikan pesantren yang masih berbentuk perencanaan operasional yang berjangka satu tahun dengan hanya keputusan yang diambil bersifat reaktif, jika dikorelasikan dengan jumlah lembaga pendidikan yang cukup banyak di dalamnya dengan segenap problematika yang dihadapi bukan tidak mungkin nanti ke depan akan berpengaruh pada teori perencanaan kurikulum. Di mana, dengan jumlah lembaga pendidikan yang cukup banyak dan dengan persoalannya yang sangat komplit dibutuhkan penanganan yang prima dan perencanaan yang lebih matang. Kalau dalam pengambilan kebijakan sifatnya reaktif, maka tidak menutup kemungkinan nanti akan menjadi reaktif korelasional atau bahkan *proactive-limited*.

Sebagaimana yang ditemukan pada ketiga kasus penelitian pada tahap perencanaan kurikulum pondok pesantren pada umumnya dilakukan secara periodik melalui

rapat-rapat yang sudah terjadwal di pesantren. Sementara perencanaan pembelajarannya untuk kurikulum pesantren yang berafiliasi dengan pemerintah menggunakan apa yang berlaku di pemerintah dengan menggunakan silabus dan RPP. Bagi pendidikan pesantren yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah, perencanaan kurikulum pembelajarannya menggunakan apa yang menjadi ketentuan di pesantren dengan menekankan pada penguasaan guru pada materi yang akan diajarkan.

Ada tiga implikasi praktis dari temuan ini. *Pertama*, keharusan bagi lembaga pendidikan pesantren untuk merumuskan terlebih dahulu gagasan tentang pendidikan di lembaga pesantren yang tidak bertentangan dengan cita-cita pesantren sebagai tujuan akhir pendidikan pesantren. *Kedua*, para guru harus mempersiapkan dengan baik materi yang akan diajarkan beserta perangkat yang ada di dalamnya supaya target pendidikan yang telah ditetapkan tercapai sesuai dengan harapan. *Ketiga*, mengupayakan agar semua komponen di sekolah, kepala sekolah beserta jajarannya, dan para guru memiliki komitmen yang sama dalam mengembangkan pendidikan di sekolah untuk mewujudkan cita-cita pesantren sebagai benteng terakhir pertahanan Islam.

Pada persoalan penganggaran di lembaga pendidikan pesantren ada yang tersentral di pesantren dan ada yang diberikan kewenangannya pada masing-masing lembaga atau pondok yang ada dalam naungannya. Kedua sistem ini mempunyai nilai positif dan negatif tergantung dari bagaimana pesantren dalam memberikan kebijakan yang dapat menguntungkan kepada pesantren. Secara praktis, sentralisasi keuangan di pesantren dapat membantu lembaga pendidikan yang kurang dilirik oleh masyarakat dan tidak menguntungkan dengan penerapan subsidi silang. Akan

tetapi, pendidikan yang kurang menguntungkan tersebut harus berbenah dan mencari solusi yang tepat agar semua pendidikan di pesantren dapat berkembang dan berjalan dengan baik.

Bagi pesantren yang menerapkan desentralisasi keuangan diharapkan dapat memberikan semangat bagi lembaga atau pondok untuk bersama-sama secara terpadu meningkatkan sumber keuangan baik yang dari *budget* maupun dari *nonbudget*. Hal tersebut dimungkinkan adanya persaingan yang sehat dan tidak keluar dari koridor dan cita-cita luhur pesantren. Di samping itu secara teoritis, perlu kiranya perpaduan teori yang dapat menggabungkan atau sebagai solusi yang mengikat dari dua sistem tersebut.

## **Kesimpulan**

Ketiga pesantren yang menjadi objek dalam kajian ini, memiliki perencanaan kurikulum sesuai dengan tipologinya masing-masing. Antara Sidogiri, Sukorejo, dan Al-Amin tampak berbeda sesuai dengan karakter masing-masing. Namun dalam proses perencanaannya, sama-sama dilakukan pada saat menghadapi tahun ajaran baru dengan mengacu kepada hasil evaluasi kurikulum sebelumnya. Perencanaan dilakukan juga dengan pertimbangan banyak sisi, seperti perkembangan zaman, aspek SDM, dan kekuatan anggaran yang dimiliki pesantren.

## **Daftar Pustaka**

- Aly, Abdullah. *Pendidikan islam multikultural di pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3IS, 1994.

- E. Mulyasa. *Praktik Penelitian Tindakan Kelas*. Bandung: Rosdakarya, 2009.
- Habil, Thoha. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Sholihin, Mahfud. Total Quality Management, Balanced Scorecard And Performance, *JAAI* 13 NO. 1, (JUNI 2009).
- Sonhadji, A, *Manusia, Teknologi, dan Pendidikan Menuju Peradaban Baru*. Malang: UM Press, 2012.
- Suhanda, Andar. Perencanaan Kurikulum Di Smp Negeri 3 Singkawang, *Akutabilitas Manajemen Pendidikan* 1, Nomor 2, (Juni 2013).
- Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Wardani, Nur Widia. Perencanaan Pengembangan Kurikulum Pada Kulliyatul Mu'allimien Al-Islamiah, *Pendidikan*, Vol.1, No. 5, (Mei 2016).